



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

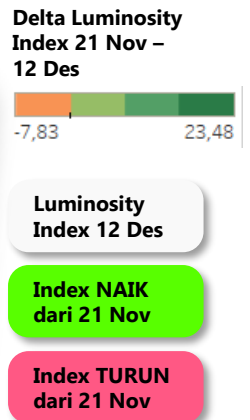
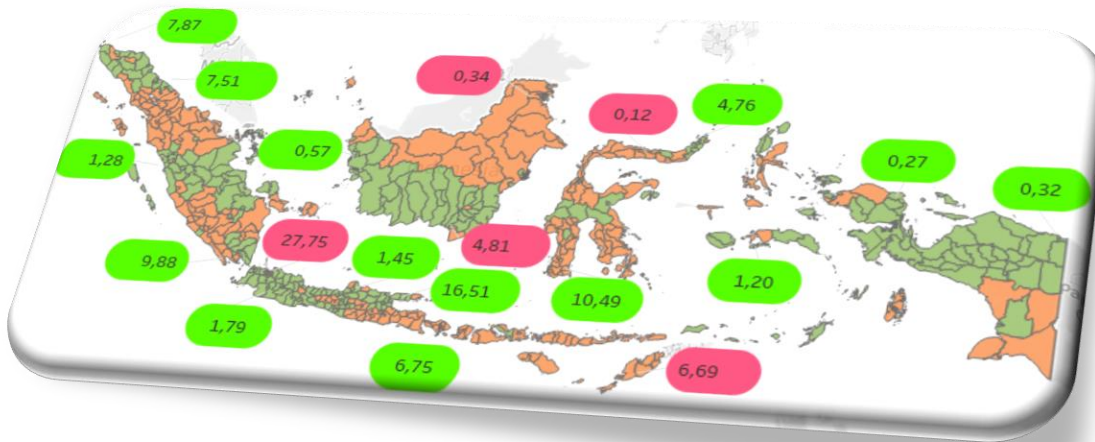


Periode 7 s.d. 18 Desember 2020

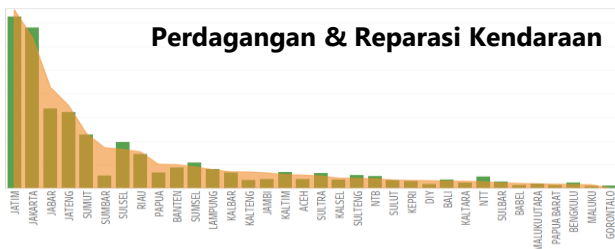
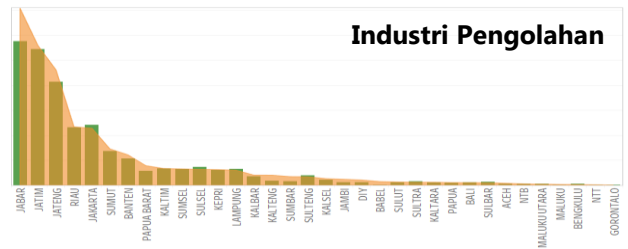
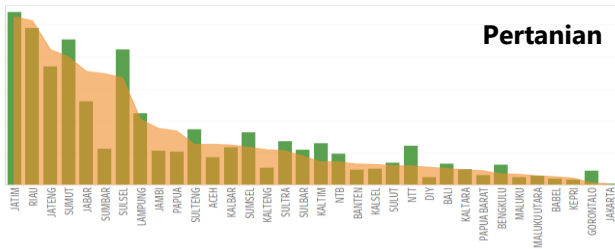
Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Sugiyarto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN

PERKEMBANGAN TINGKAT AKTIVITAS EKONOMI DI DAERAH



Berdasarkan nilai *luminosity index**, dalam periode 21 November – 12 Desember 2020, **aktivitas perekonomian** di sebagian besar wilayah **mengalami peningkatan**, meskipun di **Jakarta** masih mengalami **penurunan**. Ibu kota dengan **peningkatan** aktivitas ekonomi **tertinggi** adalah **Yogyakarta** (6,98 menjadi 11,58), **Banda Aceh** (4,55 menjadi 7,87), **Banda Aceh** (3,52 menjadi 4,55), dan **Medan** (4,74 menjadi 7,51). Namun demikian, terdapat ibu kota provinsi yang mengalami **penurunan** aktivitas ekonomi, **tertinggi** di **Jakarta** (35,57 menjadi 27,75), **Gorontalo** (0,52 menjadi 0,12), dan **Banjarmasin** (5,16 menjadi 4,81).

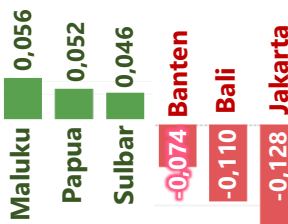


Sektor Pertanian relatif mengalami **penurunan** dengan penurunan terbesar di **Sumut** dan **Sulsel**. **Industri Pengolahan** dan **Perdagangan & Reparasi Kendaraan** relatif **stagnan**. Namun demikian, **Jabar** dan **Jateng** mengalami peningkatan aktivitas di ketiga sektor tersebut.

INDEKS MOBILITAS NASIONAL DAN DAERAH

NASIONAL – 16 Desember 2020

Top 3 & Bottom 3



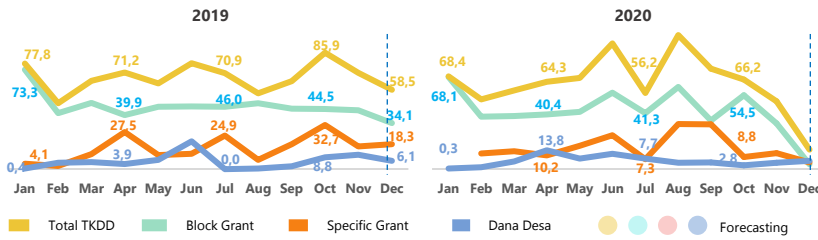
Berdasarkan nilai *mobility index** dalam periode 21 November – 16 Desember 2020, **aktivitas perekonomian nasional cenderung menurun** (-0,056 ke -0,065). Per 16 Desember 2020, *mobility index* **tertinggi** terjadi di **Maluku** (0,056), **Papua** (0,052), dan **Sulawesi Barat** (0,046). Sedangkan aktivitas **terendah** terjadi di **Jakarta** (-0,128), **Bali** (-0,110), dan **Banten** (-0,074).

*sumber: NASA dikutip Prospera, CSIS Indonesia

KINERJA FISKAL

PEMERINTAH PUSAT

TKDD Januari s.d. 18 Desember 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)



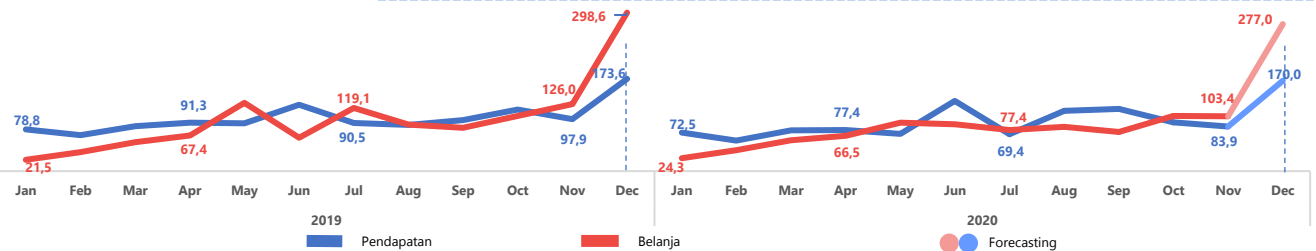
- Realisasi TKDD Rp761,3 T atau 99,7% dari pagu TKDD.
- TKDD yang disalurkan dari selama Desember 2020 sebesar Rp13,2 T.
- BLT Desa telah disalurkan ke 74.616 desa sebesar Rp20,5 T kepada 8.045.180 KPM.
- Sampai akhir 2020, diperkirakan realisasi TKDD mencapai Rp762,6 T (99,8%).

PEMERINTAH DAERAH

APBD

Januari s.d. November 2020 (YoY)
(dalam triliun rupiah)

- Realisasi Pendapatan turun 3,3% dari Rp1.024,8 T menjadi Rp991,2 T (YoY) dengan penurunan terbesar dari PAD.
- Realisasi Belanja turun 8,2% dari Rp889,4 T menjadi Rp816,3 T (YoY), karena turunnya seluruh jenis belanja, kecuali Belanja Subsidi, Hibah, dan paling besar Belanja Tak Terduga yang naik dari Rp0,7 T menjadi Rp28,5 T (YoY). Di Desember diprediksi akan ada realisasi belanja cukup besar mencapai Rp269,5 T.
- Realisasi pembiayaan netto mengalami penurunan 7,0% dari Rp60,2 T menjadi Rp55,9 T (YoY) yang sumber utamanya dari penggunaan SILPA TA sebelumnya.



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2020 2019

Pajak Daerah

155,3 184,4

Peningkatan

Pajak Rokok (+23%)

Pajak MBLB (+9%)

Penurunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (-12%)

Pajak Hotel (-55%)

Pajak Restoran (-39%)

Pajak Hiburan (-61%)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (-16%)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (-34%)

Retribusi Daerah

7,5 8,3

Penurunan

Retribusi Perizinan Tertentu (+2%)

Retribusi Jasa Umum (-5%)

Retribusi Jasa Usaha (-31%)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7,9 7,6

Lain-lain PAD Yang Sah

51,8 51,0

BELANJA DAERAH

Belanja Pegawai

2020 329,1
2019 343,7

Belanja Barang

2020 184,8
2019 205,4

Belanja Modal

2020 89,9
2019 124,3

Belanja Lainnya

2020 205,7
2019 216,0

Belanja Tidak Terduga

2020 26,6
2019 0,7

PEMBIAYAAN DAERAH

60,2

53,1

57,9

66,9

SILPA

TA Sebelumnya

POSISI KAS DAERAH

AGREGAT PROVINSI TERTINGGI

36,5

29,5

26,6

20,9

19,4

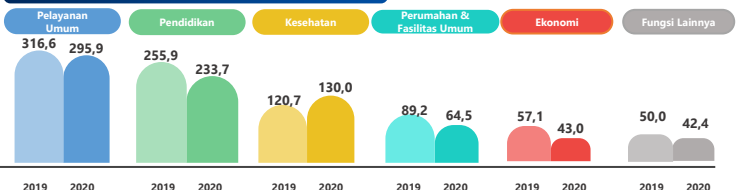
15,4

JAWA TIMUR

JAWA BARAT

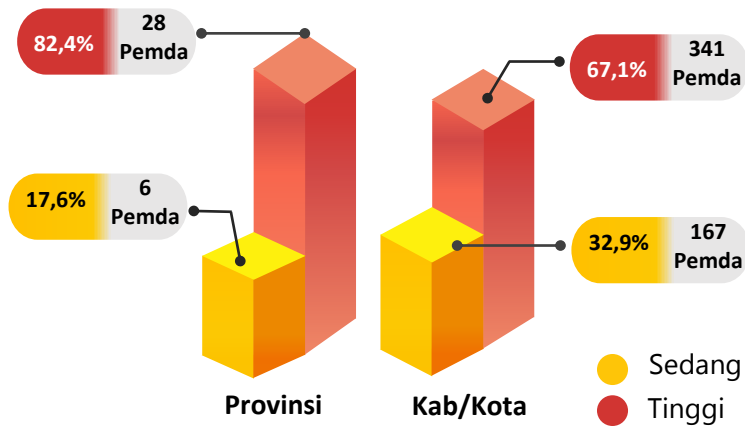
JAWA TENGAH

BELANJA BERDASARKAN FUNGSI



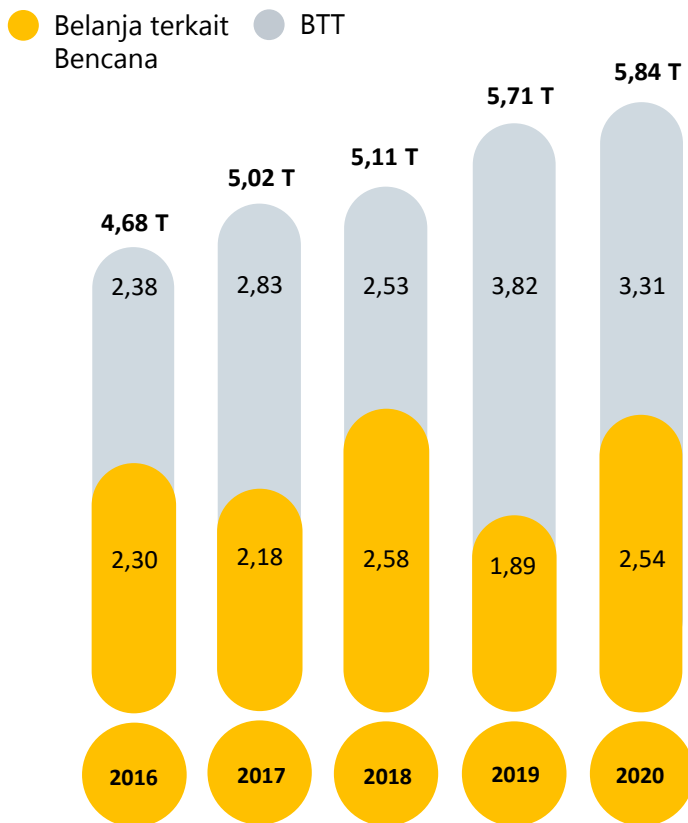
- Pembatasan aktivitas menyebabkan turunnya realisasi pajak konsumtif, seperti pajak hotel (-55%), pajak restoran (-39%), dan pajak hiburan (-61%).
- Realisasi belanja daerah masih bertumpu pada realisasi belanja pegawai dan barang/jasa sebesar 63,5% (Rp514,0 T).
- Realisasi Belanja Tak Terduga masih perlu diakselerasi, karena serapan belanja penanganan COVID-19 baru mencapai 48,8% dari total anggaran penanggulangan COVID-19.

KINERJA DAERAH



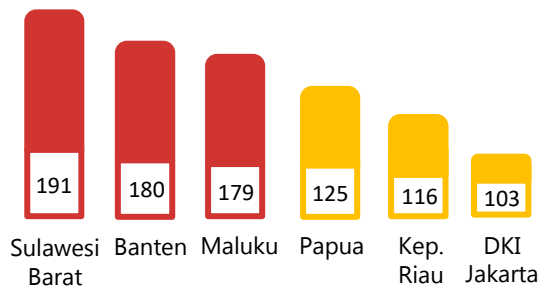
Secara Nasional pada tahun 2019, terdapat 369 Pemda dengan risiko bencana tinggi dan 173 Pemda dengan risiko bencana rendah. Berdasarkan tingkatan pemerintahan, terdapat 28 provinsi (82,4%) dan 341 kabupaten/kota (67,1%) yang mempunyai risiko bencana tinggi.

Anggaran Kegiatan Terkait Bencana dan Belanja Tak Terduga pada APBD (2016-2020)

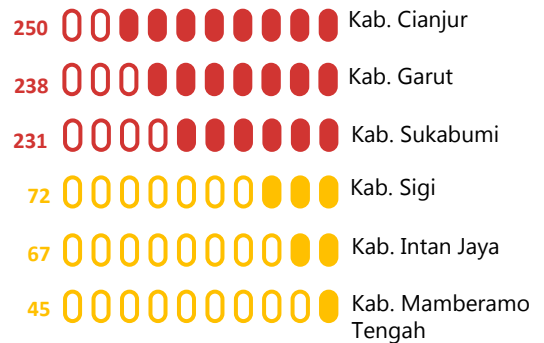


Indeks Bencana

Provinsi ● Tertinggi ● Terendah



Kab/Kota ● Tertinggi ● Terendah



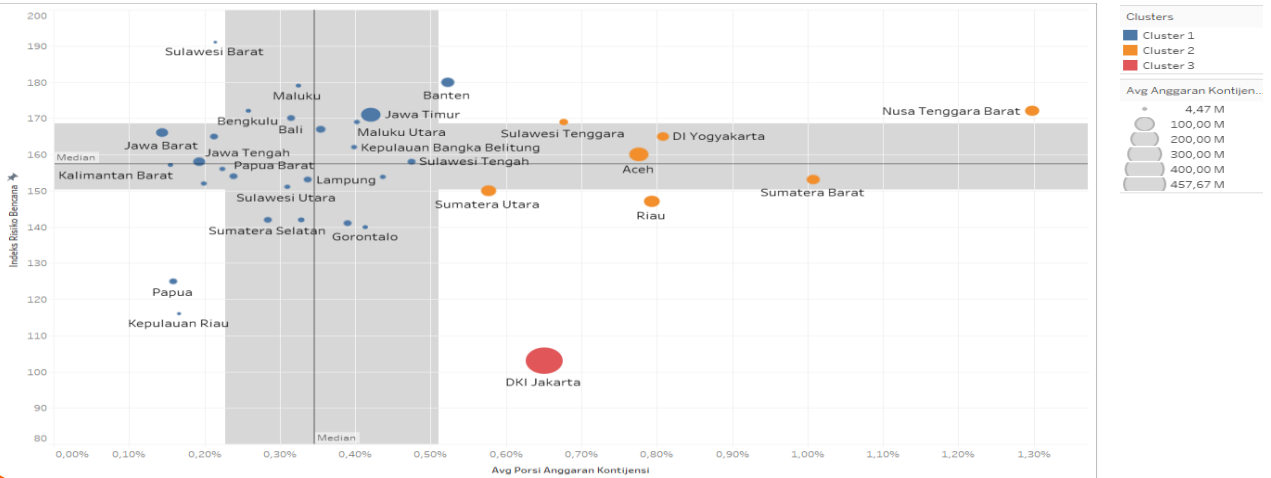
Risiko bencana tersebut perlu dikelola dengan baik, diantaranya dengan menganggarkan dana kontijensi dalam bentuk anggaran untuk kegiatan terkait pencegahan dan penanganan bencana, serta dalam bentuk Belanja Tak Terduga.

Anggaran terkait bencana dan Belanja Tak Terduga secara total mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun anggaran terkait bencana sedikit mengalami penurunan di 2019. Khusus di 2020, anggaran Belanja Tak Terduga disesuaikan dan naik menjadi Rp14,2 triliun karena ada kebijakan realokasi dan refocusing belanja menjadi Belanja Tak Terduga dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Sampai dengan November 2020, Belanja Tak Terduga sudah terealisasi sebesar Rp26,62 triliun atau 804,76% dari anggaran awal yang ada di APBD Murni 2020.

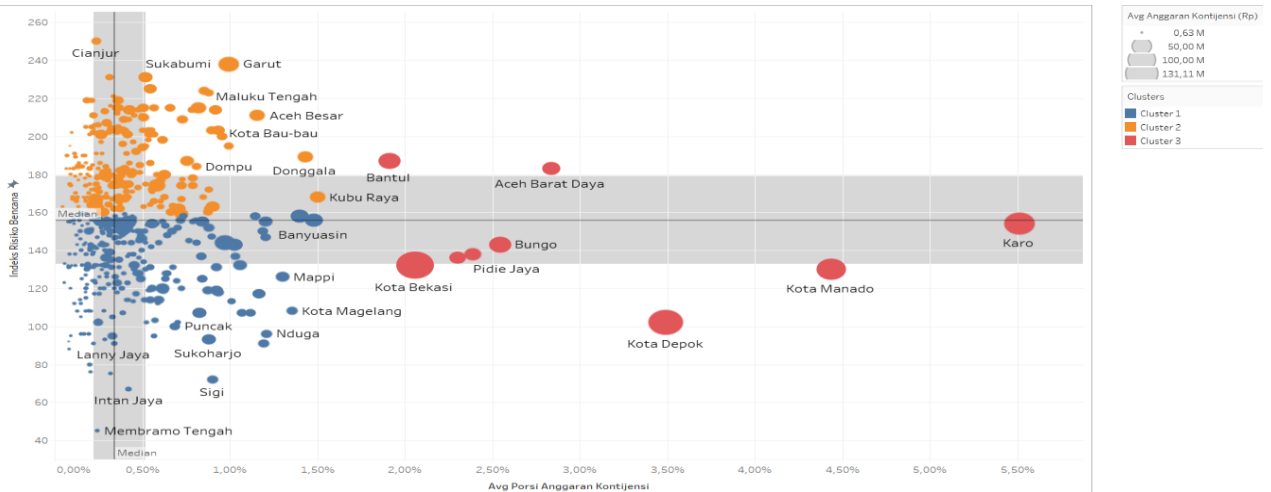
KINERJA DAERAH

Sebaran Anggaran Kontijensi dan Indeks Risiko Bencana

Provinsi

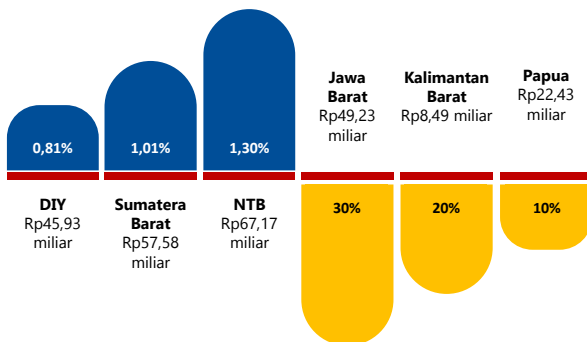


Kabupaten/Kota

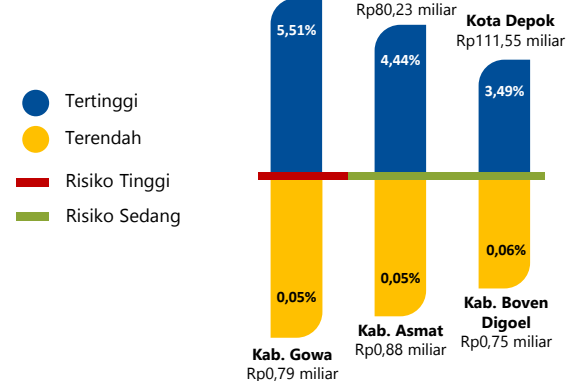


Berdasarkan kuadran porsi anggaran dan indeks risiko bencana, pemda-pemda di kuadran I merupakan pemda dengan kinerja terbaik, di mana tingginya indeks risiko bencana diiringi dengan porsi anggaran kontijensi yang tinggi juga. Namun demikian, masih terdapat pemda yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, tapi anggaran kontijensinya masih rendah. Provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Cianjur yang mempunyai indeks risiko bencana tertinggi untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota, porsi anggaran kontijensinya masih relatif rendah, yaitu berturut-turut sebesar 0,21% dan 0,24%.

Provinsi



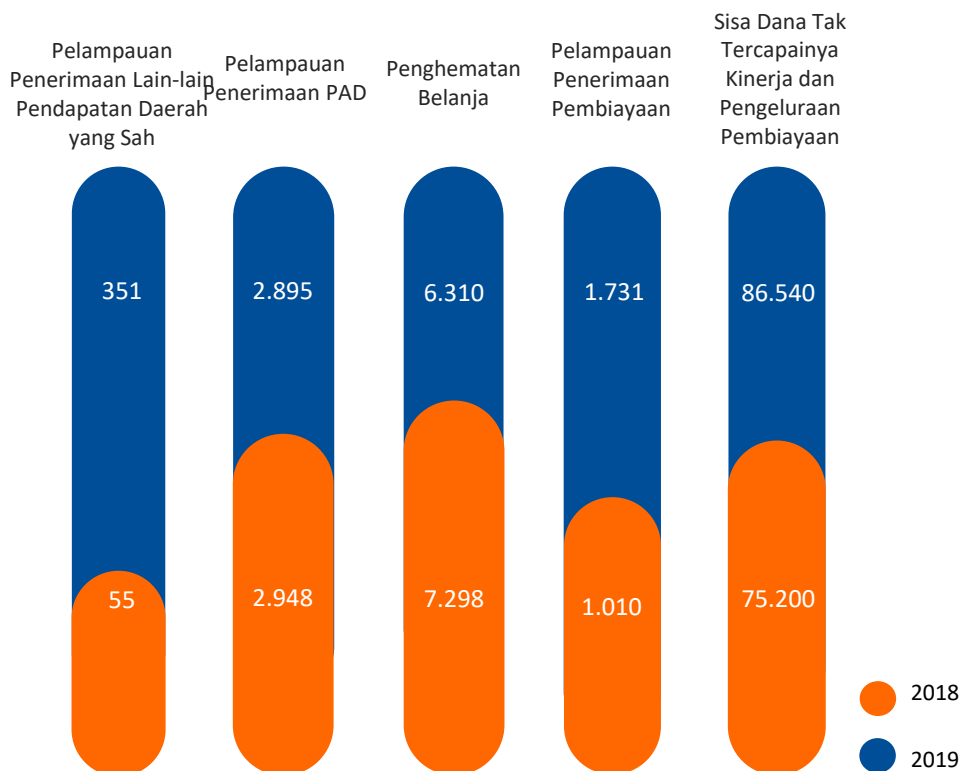
Kab/Kota



Pooling Fund Bencana

Pendanaan bencana, baik melalui APBN maupun APBD, selalu menjadi perdebatan ditengah kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk sektor-sektor prioritas, misalnya sektor Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sulitnya mengukur seberapa besar dana yang perlu disiapkan dalam APBN dan APBD menjadi salah satu kendala dalam penganggaran bencana karena tidak ada yang tahu kapan bencana akan terjadi, dimana lokasi dan seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi. Oleh karena itu, alternatif kebutuhan pendanaan untuk bencana menjadi persoalan yang penting untuk segera diimplementasikan. Salah satu alternatif pendanaan yang mengemuka adalah Pembentukan Pooling Fund Bencana yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Pooling Fund Bencana menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi risiko bencana dengan memanfaatkan berbagai skema pendanaan, misalnya asuransi bencana. Pembahasan rancangan Peraturan Presiden mengenai Pooling Fund Bencana ini telah ada sejak tahun 2019. Desain kelembagaannya pun telah dibuat seperti dibentuknya Badan Layanan Umum untuk mengelola dana bencana yang direncanakan bersumber dari APBN, pemerintah daerah, hasil investasi dari dana yang dikelola, hasil pembayaran klaim asuransi, serta sumbangan dari donor.

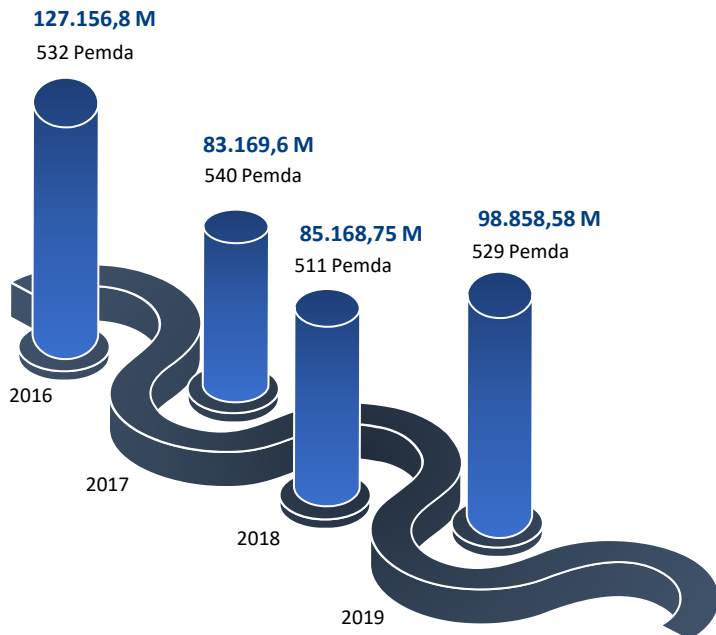
Lantas, bagaimana mekanisme Pooling Fund yang dananya bersumber dari Pemda? Salah satunya bersumber dari Pemda yang memiliki SiLPA positif atau dana surplus dapat menyisihkan uangnya untuk dikumpulkan menjadi dana bencana melalui mekanisme Pooling Fund. Pengumpulan Dana untuk bencana merupakan strategi manajemen keuangan daerah yang perlu dikembangkan di masa depan agar dampak ekonomi akibat bencana dapat dimitigasi. Pengumpulan dana bencana melalui SiLPA didapatkan dari selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. SiLPA yang dijadikan sebagai sumber pooling fund merupakan SiLPA non-earmarked yang menurut PP 12 Tahun 2019 terdiri dari lima pos yaitu, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, pelampauan penerimaan pembiayaan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.



Berdasarkan data SIKD DJPK Kemenkeu bulan Oktober tahun 2020, terdapat dana SiLPA non-earmarked sebesar 95,53% dan 4,47%-nya earmarked (sudah ada peruntukannya). Secara lebih detail, dari kelima pos dalam SiLPA APBD di seluruh daerah, paling banyak (87,5%) merupakan SiLPA non-earmarked APBD yang didapatkan dari sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan serta 6,45% dari penghematan belanja.

Alokasi SiLPA non-earmarked memungkinkan dapat diprediksi di awal tahun karena dihitung dari dana yang tidak terserap akibat tidak tercapainya target serta penghematan belanja. Alokasi SiLPA non-earmarked dapat digunakan juga sebagai cadangan pembiayaan jika terjadi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam.

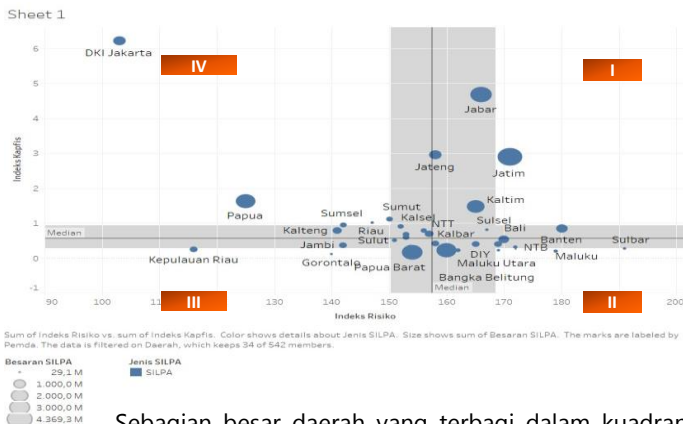
Namun demikian, seberapa realistis alokasi SiLPA non-earmarked ini menjadi sumber dana surplus untuk skema Pooling Fund Bencana? Dengan tingkat indeks risiko bencana level tertentu, berapa banyak pemda di Indonesia yang memiliki SiLPA positif dan kapasitas fiskal sedang dan tinggi?



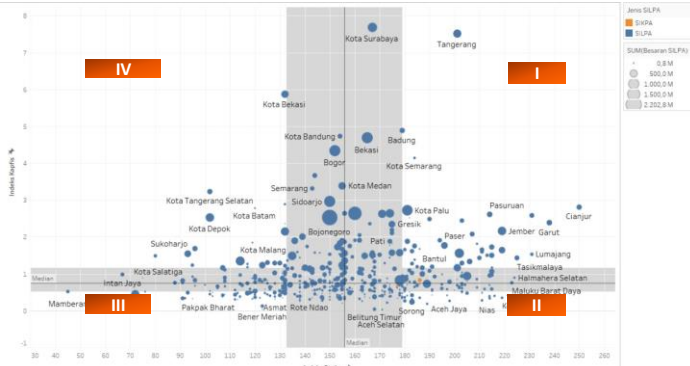
Berdasarkan data SIKD DJPK Kemenkeu, terdapat 97 persen daerah di Indonesia memiliki SiLPA yang positif. SiLPA positif menunjukkan adanya selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga masih ada dana untuk melakukan belanja program/kegiatan yang belum dianggarkan atau kebutuhan darurat/mendesak lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan faktor indeks risiko bencana dan kapasitas fiskal untuk menentukan berapa alokasi yang layak direkomendasikan untuk penempatan dana bencana dengan mekanisme Pooling Fund. Pemda yang dianggap perlu dan wajib mengalokasikan dana APBD untuk Pooling Fund itu adalah Pemda yang memiliki indeks risiko rawan bencana yang tinggi, mempunyai kapasitas fiskal sedang atau tinggi dan memiliki SiLPA positif yang cukup besar.

Diagram Kuadran yang memiliki SiLPA positif berdasarkan Kapasitas Fiskal dan Indeks Risiko Bencana

Provinsi



Kabupaten/Kota



Sebagian besar daerah yang terbagi dalam kuadran ini adalah memiliki SiLPA yang positif, namun berbeda dalam besarnya. Namun, bagaimana kesiapan pemda dan respon pemda saat diberikan wacana alokasi SiLPA pada APBD untuk Pooling Fund bencana? DJPK telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui apakah benar-benar ada dana surplus atau dana idle dengan SiLPA positifnya. Hasil dari FGD tersebut adalah sebagian besar pemda menjawab belum siap dalam mengalokasikan SiLPA untuk dana bencana. Hal ini disebabkan bahwa SiLPA positif telah ada peruntukannya di akhir tahun. Kemudian, besarnya SiLPA dari keseluruhan APBD adalah sangat kecil yaitu pada kisaran 14% dari jumlah APBD. Kondisi ini tampak berbeda dengan data SIKD yang membuktikan bahwa nilai SiLPA yang cenderung non-earmarked dan positif. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali untuk dilakukan konsolidasi data terkait SiLPA ini ke pemda dan perhitungan alokasi SiLPA yang cocok dan diperlukan pemda untuk Pooling Fund sesuai dengan kondisi kapasitas fiskal dan kondisi rawan bencana pada daerah tersebut. Selain itu, perlu dilakukan studi dan analisa lebih lanjut terkait kondisi riil SiLPA di daerah dalam kaitannya dengan idle money yang selama ini diperkirakan ada di daerah. Pada akhirnya, keadaan Indonesia yang rawan bencana bukan merupakan suatu "kutukan" apabila pemerintah, baik pusat maupun daerah mampu melaksanakan mitigasi bencana, termasuk dalam penyediaan dana untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi. Pembentukan Pooling Fund Bencana dari Dana SiLPA menjadi salah satu strategi alternatif pendanaan bencana yang dapat dimanfaatkan. Upaya ini dapat berjalan apabila didukung semua stakeholders baik di pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KABAR DAERAH

Kab. Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan normalisasi Kali Sabi di Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua sebagai langkah mengantisipasi banjir yang kerap terjadi. Panjang sungai yang di normalisasi kurang lebih 1900 meter dan lebar sungai 8 meter. Kabupaten Tangerang menargetkan normalisasi akan rampung dalam 15 hari dengan menggunakan 2 alat berat berjenis Ampibi berat 24 ton yang pengerjaannya dimulai pada tanggal 16 Desember 2020.

<https://metro.tempo.co/>

Prov. Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) siap siaga dengan adanya potensi bencana hidrometeorologi dalam enam bulan kedepan. Hal itu berdasarkan kajian BMKG yang menyatakan curah hujan periode saat ini terjadi lebih cepat dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga Pemprov Jabar menekankan kesiagaan itu dari Desember 2020 hingga bulan Mei 2021. Potensi badai la nina yang akan hadir membawa dampak pada naiknya gelombang laut. Sehingga potensi tsunami, banjir dan lain-lain harus disikapi dengan siaga satu. Adapun yang ditekankan pada kesiapsiagaan mulai dari teknologi mencari korban bencana, mengobati, dapur umum dan alat canggih yang bisa mengkonversi air kotor bisa diminum, drone bawah air, pelampung yang bisa diatur remote dan lain-lain.

<https://www.pikiran-rakyat.com/>

Kab. Mojokerto

Dalam menghadapi cuaca tidak menentu di musim peralihan ini, Pemkab Mojokerto telah melakukan mitigasi bencana, serta membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana). Salah satu langkah yang dilakukan diantaranya memasang alat deteksi dini berupa Early Warning System (EWS) di sejumlah wilayah, berdasar pada pemetaan rawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). EWS tersebut dapat mengirimkan sinyal bahaya dan terkoneksi di kantor Pusdalops BPBD. Semua bekerja secara otomatis, termasuk memberi peringatan dini pada masyarakat melalui tanda bunyi sirene dengan jangkauan mencapai 0,5 kilometer. Upaya-upaya dengan dukungan perangkat canggih, juga dibarengi dengan usaha pencegahan bersifat jangka panjang berkelanjutan. Diantaranya dengan reboisasi atau penghijauan kembali lahan-lahan gundul untuk mencegah bencana tanah longsor. Kemudian, Pemkab Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga berupaya menjaga lingkungan bersih dari sampah dengan inovasi "Simas Karto" atau kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Sampah Kabupaten Mojokerto. Serta, slogan "Sampahmu Tanggung Jawabmu" sebagai bentuk kepedulian diri terhadap lingkungan. Hal ini lahir dari kewaspadaan apabila sampah tidak dikelola dengan baik, berpotensi menjadi pemicu banjir.

<https://daerah.sindonews.com/>

Kab. Wonogiri

Pemkab Wonogiri melakukan edukasi dan pendampingan pada proses mitigasi bencana melalui pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Desa Tangguh Bencana. Pemda bekerjasama dengan para relawan, melakukan mitigasi bencana secara teknis dan terstruktur dengan tepat. Warga desa di daerah siaga bencana dilatih untuk mengantisipasi bencana alam sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing menyesuaikan dengan jenis bencana alam yang akan dialami desa, seperti tanah longsor, banjir, angin kencang, hingga kekeringan. Selain melatih kesiagaan warga, Pemkab Wonogiri juga menyiapkan manajemen dasar kebencanaan, menggerakkan potensi relawan untuk ketangguhan masyarakat, serta pembuatan peta dan dokumen kerawanan bencana. Warga juga diberikan pengetahuan tentang kajian risiko, standar pelayanan dasar bencana, struktur komando darurat, pengenalan peralatan dasar kebencanaan, hingga rencana tindak lanjut.

<https://regional.kompas.com/>

Prov. Babel

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam rangka melaksanakan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mempunyai empat strategi utama, yaitu menjadikan PRB sebagai prioritas pembangunan daerah; mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana; mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar; serta kesiapsiagaan untuk tanggap darurat yang efektif. Babel juga melibatkan peran masyarakat dan telah membentuk relawan penanggulangan bencana dengan beragam latar belakang, yang tergabung dalam Aksi Babel Peduli sekaligus telah mendapat pelatihan dan evaluasi setiap bulannya. Saat ini, tercatat 1.500 relawan anggota Aksi Babel Peduli yang udah terdata.

Pemprov Babel juga telah membuat payung hukum berupa peraturan daerah ataupun Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait PRB, selain terus berkoordinasi dengan BNPB, kementerian, dan lembaga terkait serta sinergi dengan TNI/Polri. Bangka Belitung saat ini telah mempunyai pusat pengendalian operasi yang berfungsi 24 jam tujuh hari khusus untuk memonitor serta memantau peringatan beberapa ancaman bencana dan membuat langkah-langkah mitigasi sesuai dengan bahaya yang dihadapi.

<https://republika.co.id/>

Kab. Cianjur

Kabupaten Cianjur menempati urutan kedua daerah paling rawan bencana di Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyiapkan relawan dan alat berat menghadapi potensi bencana hingga akhir 2020. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Cianjur masih berada di urutan atas sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi. Data BPBD Kabupaten Cianjur mengkonfirmasi bahwa 360 desa dan kelurahan di 32 kecamatan di Cianjur memiliki kerawanan bencana, mulai dari puting beliung, banjir, hingga longsor. Beberapa upaya yang dilakukan Pemkab Cianjur untuk meminimalisir risiko bencana diantaranya dengan membentuk relawan di setiap Desa. Hal ini juga bertujuan agar penanganan bisa lebih ditanggap disaat bencana itu terjadi. Kemudian, saat ini Cianjur sendiri belum menetapkan status siaga bencana. Namun, Pemkab Cianjur sudah mempersiapkan dalam rangka antisipasi datangnya bencana seperti menggelar apel siap siaga bencana, cek dan persiapan peralatan, SDM, hingga SOP penanganan bencana.

<https://news.detik.com/>



INOVASI DAERAH

KABUPATEN TELUK BINTUNI

Early Diagnosis And Treatment (EDAT) System dalam Pengendalian Malaria

Malaria merupakan salah satu wabah yang pada umumnya terjadi pasca bencana alam, seperti pasca bencana gempa bumi di Lombok, Palu, dan Aceh. Bumi Cendrawasih menempati urutan teratas sebagai penyumbang kasus malaria terbanyak di Indonesia. **Teluk Bintuni** juga dihadapkan pada permasalahan penyakit malaria sebagai salah satu bencana non alam. Angka prevalensi malaria sebesar 9% pada tahun 2004/2005 ditargetkan untuk turun menjadi kurang dari 1% dan angka kesakitan malaria ditargetkan untuk turun dari 114.9 per 1000 penduduk tahun 2009 menjadi kurang dari 5 per mil tahun 2016. Tentunya dengan luas wilayah 18.637 km², terluas di Propinsi Papua Barat, dan jumlah penduduk 62 ribu jiwa yang tinggal tersebar di pinggiran pantai, dataran, dan pegunungan, menjadi tantangan tersendiri bagi Teluk Bintuni. Untuk itu, Pemda berupaya mengembangkan sistem **Early Diagnosis And Treatment (EDAT)**. Keberhasilan pengendalian Malaria dengan Sistem EDAT mengantarkan Teluk Bintuni menjadi pemenang **United Nations Public Service Awards (UNPSA)** Tahun 2018.

Pembentukan Juru Malaria Kampung (JMK)

JMK dibentuk ditempat yang tidak tersedia tenaga kesehatan. Kandidat JMK dipilih oleh masyarakat dan dilatih selama 1-2 minggu agar dapat melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria, serta disupervisi dan diberi *refresh training* secara rutin.

Re-packaging Malaria Medicine

Pengepakan obat malaria dengan sistem warna mempermudah pemberian dan penggunaan obat.

Penggunaan Malaria Kit

Semua logistik obat malaria selalu terkontrol, sehingga manajemen stock obat menjadi sangat baik. Malaria kit di distribusikan di semua puskesmas, puskesmas pembantu dan JMK.

Social Marketing

Semua puskesmas, pustu dan JMK dibuatkan poster secara khusus dan ditempelkan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan di tempat-tempat umum yang berisi gambar kepala puskesmas, pustu, dan JMK setempat disertai anjuran penggunaan obat malaria secara benar, informasi tempat pemeriksaan malaria dan cara penggunaan obat yang tepat.

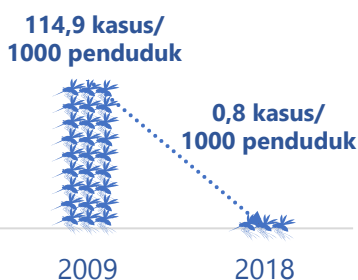
Integrated Quality Assurance

dilakukan secara terpadu dan konsisten melalui pelatihan, monitoring pelaksanaan program di lapangan, *internal and external cross-checking*, *refresh training*, dan penggunaan sistem skoring untuk evaluasi kinerja petugas kesehatan di puskesmas.



LESSON LEARNED

EDAT menekan kasus Malaria



Inovasi serupa tentunya dapat dilakukan oleh Pemda lain dan untuk program atau bidang lainnya. Empat faktor yang membuat program EDAT berhasil, antara lain:

1. Penentuan JMK yang dilakukan melalui proses pemilihan oleh masyarakat sendiri memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam program ini
2. *Repackaging malaria medicine*, yang merupakan penyesuaian untuk membantu penderita yang tidak bisa membaca.
3. Publikasi dari program yang dilakukan, peningkatan dan pengawasan kualitas SDM yang terlibat, dan sistem distribusi logistik yang baik.
4. Pendanaan tidak terlalu besar namun berdampak signifikan terhadap penurunan kasus Malaria di Teluk Bintuni.

KAJIAN PILIHAN

Pooling Fund Bencana Sebagai Alternatif Baru Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia



Indonesia memerlukan skema pendanaan penanggulangan yang tangguh untuk mengatasi resiko bencana maupun resiko fiskal sebagai dampak kerusakan dan kerugian bencana yang sangat besar. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi tugas dalam melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari pencegahan dan pengurangan resiko, penanggulangan bencana, hingga ke pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam praktiknya pemerintah daerah belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai. Reviu belanja secara nasional berdasarkan data APBD-P 2018 jumlah dana "bencana" dan belanja tidak terduga seluruh Pemda hanya pada kisaran Rp6,5 triliun atau tidak sampai 1% dari total belanja APBD. Reviu atas alokasi belanja bencana pada tiap tahapan bencana juga menunjukkan ketergantungan daerah terhadap pusat dalam penanggulangan bencana khususnya pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Banyaknya urusan daerah yang harus didanai oleh APBD menyebabkan penanggulangan bencana bukan merupakan urusan prioritas.

Sejak tahun 2018 Kementerian Keuangan telah menerbitkan Strategi Pembiayaan dan Asuransi Resiko Bencana (PARB) yang salah satu strateginya adalah perlunya dibentuk *pooling fund* bencana (PFB) yang fokus pada upaya perlindungan atau bantuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan aset milik negara dan milik daerah. Pembentukan PFB walaupun sudah diamanatkan dalam UU APBN, namun sebaiknya dipertegas lagi pada undang-undang yang terkait penanggulangan bencana dan/atau hubungan keuangan pusat dan daerah.

Beberapa aspek skema PFB di negara lain bisa diadopsi namun kebijakan mengenai aspek desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan dalam menjaga *governance* dan semangat solidaritas antar daerah yang berkontribusi kepada PFB.

Skema Pooling Fund di Berbagai Negara

Aspek	FONDEN (Mexico)	LDDRMF (Philipina)	SDRF (India)
Plafon	Persentase tertentu	Persentase tertentu	Plafon nasional dan per negara bagian ditetapkan per tahun oleh Komisi keuangan
Sumber	0,4% dari Federal Budget	5% dari pendapatan Pemda	Pemerintah Pusat 75% dan 90%, Neg. Bagian Kategori Umum 25%, Kategori Khusus 10%
Pengelola	Banobras (Bank BUMN)	LDDRM Council (Sejenis BLU)	Rek. Khusus Bencana Pemt. India.
Penerima	Pem. Federal, Negara Bagian, dan Kota	Dana daerah digunakan untuk membantu Pemda lain yang terkena bencana.	Maksimal 10% per tahun per negara bagian untuk tanggap darurat
Investasi dan Asuransi	Bisa	Tidak diketahui	Tidak diketahui
Peruntukan	(i) Rehabilitasi dan Rekonstruksi BMN/D, (ii) Bantuan untuk tanggap darurat, (iii) Mencegah dan mengurangi risiko.	Bantuan tanggap darurat (30%), Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, rehab dan rekonstruksi (70%)	Bantuan tanggap darurat (immediate relief)
Jenis bencana	Bencana alam dan karhutla	Bencana alam	Bencana alam, kebakaran, & wabah
Jangka waktu pengelolaan	Tidak terbatas dan dana terakumulasi	5 tahun setelahnya kembali ke anggaran setiap Pemda.	Tidak terbatas dan dana terakumulasi

KAJIAN PILIHAN

Pooling Fund Bencana Sebagai Alternatif Baru Sumber Pendanaan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

PFB sebaiknya mengatur secara tegas mengenai target dana dikelola, status badan pengelola, kontribusi pendanaan dari pusat dan daerah, ruang lingkup kegiatan Pemda yang bisa didanai pada setiap tahapan bencana agar tidak terjadi duplikasi dengan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, dana PFB tentunya perlu dikelola dalam rekening negara atau dikelola dalam rekening khusus institusi penyelenggara layanan publik yang bisa berbentuk Badan Layanan Umum (BLU), Badan Hukum Publik (BHP) semisal BPJS, atau Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berbentuk seperti PTN, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih *profit-oriented*.

Lembaga pengelola PFB sebaiknya yang memiliki status hukum yang bersifat nonprofit, melakukan upaya *revolving fund*, bisa melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta jika dimungkinkan bisa melakukan asuransi/reasuransi seperti yang dilakukan oleh FONDEN. Lembaga pengelola PFB juga harus dapat memberikan layanan bantuan bencana kepada Pemda atau langsung kepada masyarakat dan/atau BMN/BMD yang terdampak bencana.

Rekomendasi Kebijakan *Pooling Fund* Bencana

1
PFB perlu memiliki tujuan yang lebih terarah sebagai salah satu skema pendanaan penanggulangan bencana yang bersifat komplementer atas anggaran penanggulangan bencana di APBN dan APBD.

2
Jenis-jenis bencana yang bisa dibantu dengan dana PFB perlu diarahkan. Sebagai penanggulangan, lima tahun pertama PFB sebaiknya menentukan skema dan persentase jenis bencana yang sifatnya tahunan dan yang jarang terjadi, namun memetakan.

3
Ruang lingkup kegiatan pada tahap tanggap darurat yang didanai perlu dipertegas secara rinci. PFB memetakan secara spesifik jenis kegiatan ditahap tanggap darurat yang bisa didanai agar tidak terjadi duplikasi pendanaan dari APBN dan APBD.

4
PFB dapat membantu Pemda dalam mewujudkan ketangguhan dalam menghadapi bencana, serta mengarahkan proses pemulihan dan perbaikan pasca bencana yang selalu mengacu pada tujuan *build back better*.

5
Besaran target kebutuhan dana PFB untuk lima tahun pertama dapat mengacu pada angka *financial gap* di kisaran 20 triliun yang diestimasikan berdasarkan kerugian ekonomi langsung.

6
Kontribusi Pemda dalam PFB bersifat *mandatory*, perlu diamanatkan dalam UU APBN atau UU tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah.

7
Seluruh Pemda berhak mendapatkan bantuan pendanaan dari PFB untuk kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko, penanggulangan bencana hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

8
PFB sebaiknya menetapkan secara tegas besaran dan bentuk bantuan pendanaan kepada penduduk, BMN atau BMD yang terkena bencana.

Penulis : Wahyu Widjayanto